



**Manajemen Konflik dan Negosiasi Wajah Dalam Budaya
Kolektivistik (Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo)**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata I

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Anjar Mukti Yuni Pamungkas

NIM : 14030111140116

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

Manajemen Konflik dan Negosiasi Wajah dalam Budaya Kolektivistik (Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo)

Oleh : Anjar Mukti Yuni Pamungkas

ABSTRAKSI

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, pembangunan yang ada di daerah menyebabkan konflik dengan masyarakat daerah tersebut, contohnya yaitu konflik pembangunan bandara internasional Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik, kendala untuk mengurangi konflik dan manajemen konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma intepretif. Cara pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Face Negotiation Theory* dan *Standpoint Theory*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemicu konflik yaitu program pembangunan bandara, perbedaan pandangan antara dua kubu, adanya provokator dan anggapan bahwa pembangunan menyengsarakan kehidupan. Kendala dalam mengurangi konflik yaitu perbedaan pandangan antarkubu, adanya provokator dan anggapan pembangunan menyengsarakan kehidupan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat pro pembangunan yang memiliki kekuasaan melakukan intimidasi kepada masyarakat kontra yang tidak memiliki kekuasaan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi konflik melalui penghindaran (*avoiding*) dan pengungkapan emosi (*emotional expression*). Perlu dilengkapi dengan bantuan pihak ketiga (*third party help*) untuk mengurangi konflik di masyarakat.

Kata kunci : konflik, pembangunan, bandara, masyarakat, kekuasaan, dialog,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak bisa dilepaskan dengan fasilitas yang ada di suatu kota. Bandar udara (bandara) merupakan salah satu fasilitas yang memudahkan mobilitas seseorang. Dalam perjalanannya, kapasitas terminal Bandara Internasional Adi Sucipto sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang per tahun. Bandara yang hanya didesain untuk 1,2 juta penumpang harus menampung hingga 5,7 juta penumpang di tahun 2013. Pertumbuhan penumpang Bandara Internasional Adi Sucipto tiga tahun terakhir yaitu 4,3 juta penumpang di 2011; 4,9 juta penumpang di 2012 dan 5,7 juta penumpang pada 2013. Sisi udara juga mengalami kejenuhan kapasitas, contohnya adalah area parkir pesawat yang terlalu penuh sehingga tidak bisa melayani pesawat tipe tertentu. Nilai kepuasan pelanggan dari 3.87 pada tahun 2011 menjadi 3.53 pada tahun 2012. Menghadapi kondisi tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) berkeinginan membangun bandara baru sebagai pengganti Bandara Internasional Adi Sucipto. (sumber : materi sosialisasi pembangunan bandara internasional Kulon Progo oleh PT. Angkasa Pura 1, 10 September 2014)

Terdapat beberapa lokasi yang direncanakan menjadi tempat relokasi Bandara Internasional Adi Sucipto, diantaranya yaitu di Kecamatan Temon, Kulon Progo. Berdasarkan pada hasil Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 31 Maret 2015 menyatakan bahwa luas lahan pembangunan bandara di Kecamatan Temon sebesar 645,63 ha. Lahan tersebut akan menggusur lima desa yang terdiri dari Desa Glagah (2.720), Palihan (2.164), Sindutan (2.003), Jangkaran (1.681) dan Kebonrejo (1.317), sehingga jumlah warga yang

tergusur sebanyak 9885 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat pemukiman, tempat ibadah, sekolah, sawah dan tempat usaha yang akan tergusur akibat pembangunan bandara di Kecamatan Temon. (sumber : materi diskusi milik Sekolah Bersama (Sekber) di UGM pada Februari 2015).

Respon masyarakat setempat dalam menghadapi rencana pembangunan bandara internasional Kulon Progo beragam. Ada pihak yang setuju namun ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara internasional Kulon Progo. Alasan masyarakat setuju karena pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Alasan masyarakat tidak setuju dengan pembangunan bandara karena pembangunan dapat menghilangkan pemukiman dan melenyapkan mata pencaharian penduduk desa yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, mematikan pariwisata Pantai Glaggah dan Pantai Congot, melindungi situs budaya yang terdapat di lokasi pembangunan bandara.

Masyarakat dalam kedua kubu menghindari komunikasi dan interaksi dengan masyarakat kubu lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan yaitu bagaimana manajemen konflik yang dilakukan dalam masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

- a. Mengetahui manajemen konflik yang dilakukan oleh masyarakat kolektivistik di Kecamatan Temon.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengalaman Dalam Memahami Program Pembangunan Bandara

Konflik pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo berada dalam ranah komunikasi budaya yang dapat dipahami menggunakan *Standpoint Theory*. Pihak yang terlibat dalam konflik terdiri dari mereka yang memiliki posisi sosial dan kekuasaan yang tidak sejajar, yaitu posisi sosial tinggi dan posisi sosial rendah. Kubu pro pembangunan bandara berasal dari posisi sosial yang lebih tinggi yaitu pemerintah. Mereka memahami pembangunan sebagai sebuah kegiatan yang membawa dampak positif, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kunjungan wisatawan dan menambah lapangan pekerjaan. Mereka mengajak masyarakat yang terdampak untuk berpartisipasi dalam pembangunan bandara di Kulon Progo. Kubu kontra pembangunan berasal dari posisi sosial yang lebih rendah yaitu masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Mereka bersikap kontra karena pembangunan akan menghilangkan mata pencaharian dan mengancam keberlangsungan hidup.

Warga pro pembangunan seringkali melakukan intimidasi kepada warga kontra pembangunan. Bentuk intimidasi tersebut berupa ancaman jika masyarakat bersikap kontra pembangunan maka pembayaran tanah tidak akan dilakukan, pelayanan di Balai Desa tidak akan dilakukan dan penuntutan warga ke pengadilan. Sementara itu, masyarakat kontra yang bekerja sebagai PNS mendapatkan intimidasi berupa ancaman pembayaran gaji tidak akan dilakukan, pemindah tugas pekerjaan dan penurunan jabatan. *Standpoint Theory* tidak cukup memberikan penjelasan mengenai perbedaan posisi sosial diantara pihak pro dan kontra pembangunan. Oleh karena itu, *Standpoint Theory* perlu dilengkapi konsep mengenai intimidasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi adalah tindakan menakut-

nakuti (terutama untuk memaksa pihak lain untuk berbuat sesuatu); gertakan dan ancaman (Suharso & Retnoningsih, 2005 :188).

2.2 Pengalaman Tentang Konflik Antar Kubu

Proses komunikasi antara dua kubu pembangunan bandara menjadi *mindlessness* karena adanya komunikasi yang terpolarisasi (*polarized communication*). Komunikasi yang terpolarisasi (*polarized communication*) terjadi ketika para komunikator tidak mampu memahami pandangan pihak lain, adanya pandangan yang menganggap bahwa kita benar dan kamu salah. Komunikasi terpolarisasi terjadi ketika individu memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap budayanya sendiri dan ketertarikan yang rendah pada budaya pihak lain (Gudykunst, 1997 :278). Komunikasi terpolarisasi menyebabkan rendahnya toleransi dan penghargaan terhadap pihak lain. Hal itu akan menyebabkan masing-masing pihak memiliki pandangan yang dianggap benar, sehingga kurang bisa menerima pandangan pihak lain (Rahardjo, 2005 : 12).

Face Negotiation Theory memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Dalam konflik di masyarakat Kecamatan Temon yang merupakan masyarakat kolektivistik mereka menggunakan *interdependent self construal* dan tipe pemeliharaan wajah *mutual face maintenance* dan *other face maintenance*. Strategi penghindaran (*avoiding*) dan pengungkapan emosi (*emotional expression*) digunakan untuk mengurangi konflik di masyarakat. Masyarakat masing-masing pihak memilih untuk menghindari masyarakat pihak lain. Bentuk penghindaran tersebut misalnya masyarakat memilih untuk tidak bertegur sapa, tidak bertemu dengan warga kubu lain, tidak mengajak kenduri, tidak mengajak kerja bakti dan tidak mengajak sambutan pernikahan. Strategi pengungkapan emosi (*emotional expression*) dilakukan dengan tulisan sindiran di sepanjang Jalan Daendles. Tulisan tersebut ditulis oleh warga kontra yang ditujukan kepada pemerintah dan warga pro pembangunan. Tulisan tersebut merupakan bentuk

kekecewaan warga kontra pembangunan kepada pemerintah yang akan menggusur warga yang sudah merasa sejahtera dengan hidup sebagai petani.

Jika berdasarkan *Face Negotiation Theory*, maka strategi penghindaran (*avoiding*) merupakan strategi penyelesaian konflik yang dilakukan dalam masyarakat kolektivistik. Strategi pengungkapan emosi (*emotional expression*) merupakan strategi penyelesaian konflik dalam masyarakat individualistik. Dibutuhkan bantuan pihak ketiga (*third party help*) untuk menyelesaikan konflik yang ada diantara dua kubu masyarakat. Pihak ketiga tersebut bisa memiliki peran sebagai mediator, abritator atau pihak netral. Masyarakat berkonflik menggunakan cara pengungkapan emosi (*emotional expression*) yang merupakan sebuah cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat individualistik. Oleh karena itu, *Face Negotiation Theory* perlu ditambah konsep mengenai pengungkapan emosi (*emotional expression*) sebagai strategi penyelesaian konflik dalam masyarakat kolektivistik.

2.3 Pengalaman Tentang Resolusi Konflik Kedua Kubu

Olsen (1978) menyatakan bahwa konflik muncul dari sumber instrumental ataupun sumber *expressive*. Konflik *expressive* muncul dari keinginan untuk menimbulkan ketegangan, biasanya dihasilkan dari adanya permusuhan. Konflik instrumental timbul karena adanya perbedaan tujuan. Dari hasil penelitian, informan kontra menyatakan tidak memiliki keinginan untuk mengurangi konflik dengan masyarakat kubu pro. Mereka beranggapan bahwa konflik di masyarakat belum bisa berkurang selagi masih ada isu pembangunan bandara di Kecamatan Temon.

Ting-Toomey meyakini bahwa anggota budaya individualistik memerlukan waktu sebentar dalam mengelola konflik, sedangkan anggota budaya kolektivistik membutuhkan waktu lama dalam mengelola konflik (Gudykunts & Kim, 1997 : 280). Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan kontra, bahwa mereka tidak mengetahui kapan konflik di masyarakat akan berakhir.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai manajemen konflik dan negosiasi wajah dalam budaya kolektivistik. Berikut ini beberapa simpulan hasil penelitian, yaitu :

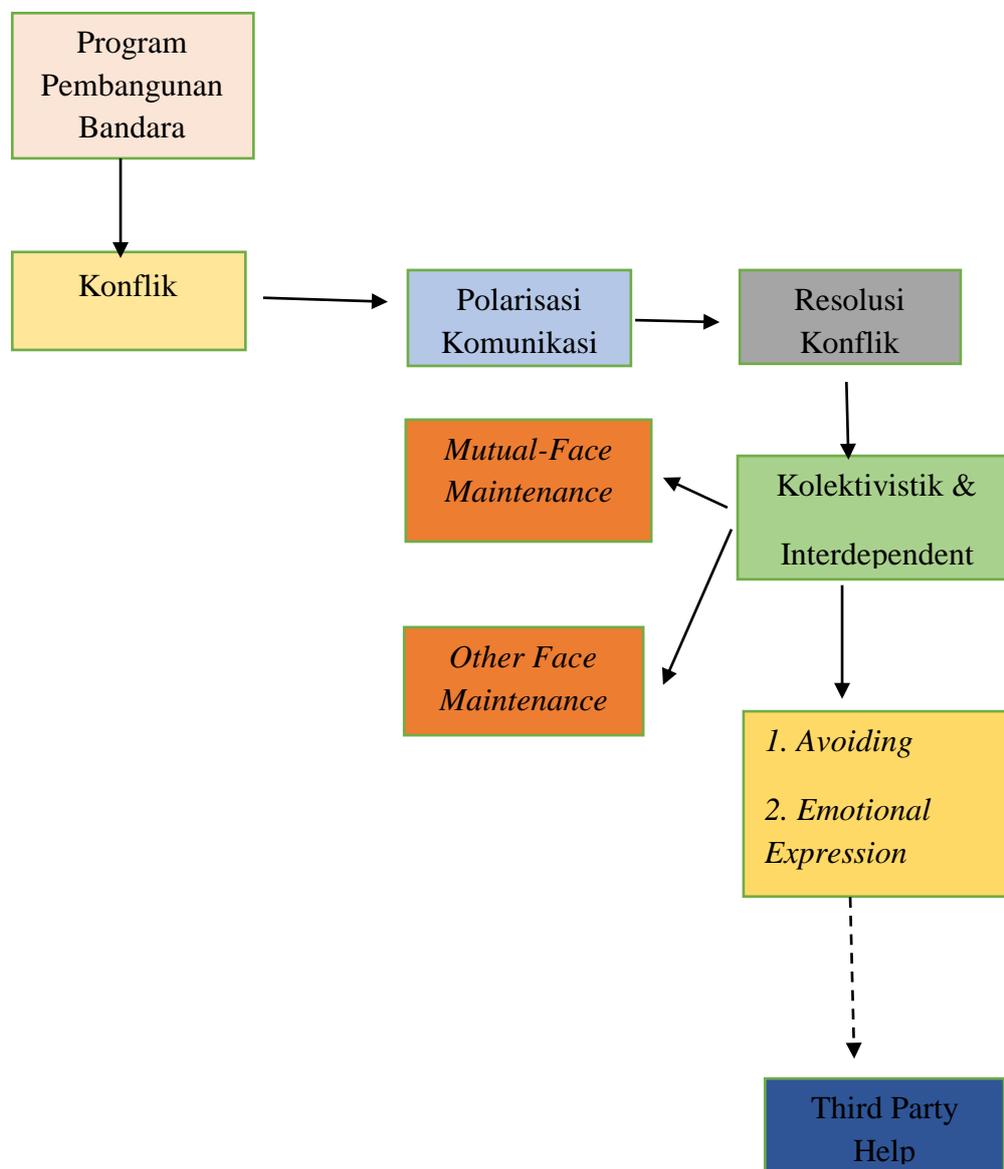
1. Manajemen konflik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Temon melalui cara penghindaran dan pengungkapan emosi.
2. Dari kedua cara manajemen konflik tersebut, cara penghindaran lebih dominan digunakan oleh masyarakat Kecamatan Temon. Hal itu karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda mengenai pembangunan. Maka dari itu, mereka memilih untuk menghindari masyarakat kubu lain untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.
3. Adanya komunikasi yang terpolarisasi (*polarized communication*) yang menganggap bahwa kutub kita sebagai kutub superior dan kutub mereka sebagai kutub inferior. Terdapat jarak komunikasi antara dua kubu masyarakat yang berkonflik.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Akademis

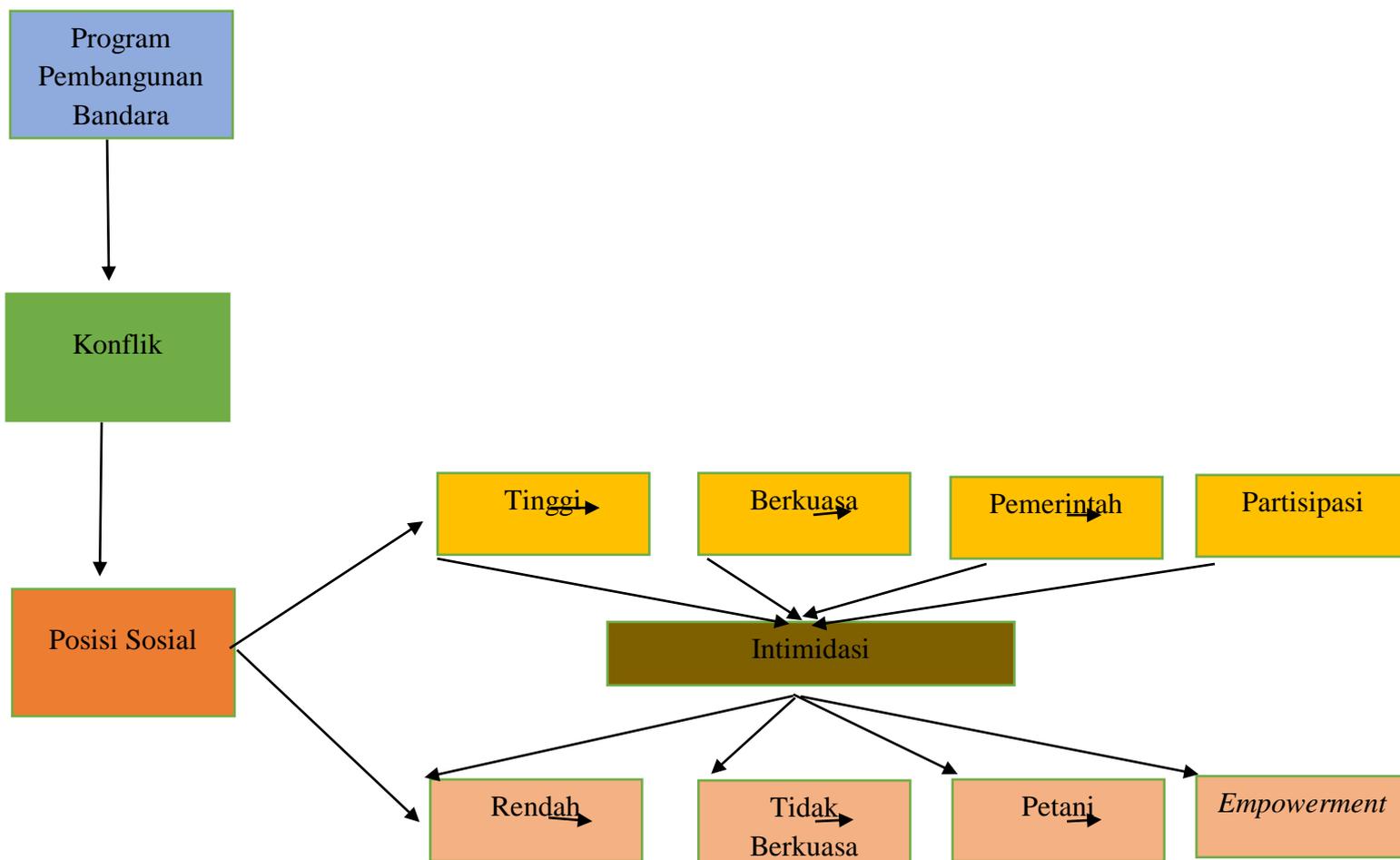
Face Negotiation Theory memberikan penjelasan mengenai resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua kubu masyarakat yang berkonflik. Masyarakat dalam budaya kolektivistik yang interdependen akan melakukan *mutual face maintenance* dan *other face maintenance* dalam menghadapi konflik. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi konflik melalui penghindaran (*avoiding*) dan pengungkapan emosi (*emotional expression*). Penghindaran (*avoiding*) lebih dominan digunakan oleh masyarakat yang berkonflik, karena kedua pihak masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Kedua upaya tersebut belum mampu menjelaskan cara penyelesaian konflik yang menghasilkan *win-win solution*. *Third*

party help bisa digunakan sebagai upaya untuk mengurangi konflik di masyarakat. Pihak ketiga bisa berfungsi sebagai sebagai *mediator*, *abritator* atau pihak netral. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis akan membuat bangunan teoritik. Berikut ini bangunan teoritiknya :



Standpoint Theory digunakan untuk melihat posisi sosial dan kekuasaan yang berbeda dalam memandang pembangunan bandara. Masyarakat kubu pro pembangunan yang terdiri dari pemerintah memandang pembangunan dari sisi positif. Masyarakat kubu kontra yang

terdiri dari petani dan buruh tani memandang pembangunan dari sisi negatif. Mereka menganggap bahwa pembangunan akan menghilangkan mata pencaharian mereka. Masyarakat pro pembangunan seringkali melakukan intimidasi kepada masyarakat kontra pembangunan. Tujuan intimidasi agar masyarakat kontra pembangunan bersikap setuju terhadap pembangunan. Teori ini perlu dilengkapi dengan konsep intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berkuasa kepada masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Berikut ini akan dibuat bangunan teoritik berdasarkan *Standpoint Theory*.



5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bahwa konflik di masyarakat disebabkan karena adanya prasangka di masing-masing kubu masyarakat. Prasangka adalah generalisasi

kaku dan menyakitkan mengenai sekelompok orang. Pemicu prasangka yaitu adanya program pembangunan bandara, perbedaan pandangan antara kubu pro dan kontra pembangunan, adanya provokator dan adanya anggapan bahwa pembangunan akan menyengsarakan kehidupan masyarakat.

Terjadi proses komunikasi yang terpolarisasi (*polarized communication*) di masyarakat. Adanya anggapan bahwa kutub kita sebagai kutub superior dan kutub mereka sebagai kutub inferior. Terdapat jarak sosial di masing-masing kubu masyarakat yang berkonflik.

5.2.3 Implikasi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang mendorong upaya penyelesaian konflik dalam pembangunan bandara di Kulon Progo melalui bantuan pihak ketiga (*third party help*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura 1 (Persero) dan masyarakat yang terlibat konflik dalam proses manajemen konflik melalui bantuan pihak ketiga (*third party help*), yang berfungsi sebagai mediator, arbitrator ataupun pihak netral.